

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ruang lingkup Hubungan Internasional setiap negara di dunia memiliki suatu kebijakan luar negeri yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh sejarah dan ideologi negara tersebut. Kebijakan luar negeri dirancang guna membantu melindungi kepentingan nasional suatu negara, tujuan ideologis, keamanan nasional, serta kemakmuran ekonomi suatu negara. Namun, untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan situasi atau keadaan internasional, suatu negara tetap harus berpegang teguh terhadap landasan dasar negara serta prinsip politik luar negerinya. Politik Luar Negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negerinya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional. Jadi politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke negara lain dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. (Prawirasaputra, 1985:19)

Letak geografis Indonesia berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia yang menjadikan posisi Indonesia menjadi negara yang paling

strategis dikawasan Asia Pasifik. Selain itu Indonesia merupakan kawasan konsumsi dan produksi yang berarti bagi ekonomi dunia, karena tanah di Indonesia mengandung kekayaan bahan-bahan mentah mineral serta permukaan tanahnya yang dapat menghasilkan bahan-bahan mentah pertanian untuk ekonomi dunia. Hal ini yang kemudian mengundang banyak Negara besar berkepentingan untuk menjalin kerja sama baik di bidang ekonomi dan pertahanan, seperti hubungan bilateral yang terjalin Negara Indonesia dan Negara Australia mempunyai sejarah cukup yang panjang. Hubungan dan kerja sama tersebut timbul akibat adanya suatu kebutuhan yang disebabkan antara lain karena pembagian kekayaan alam dan terjadi perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Disinilah kemudian hubungan antara Australia dan Indonesia berawal, dimana diantara kedua negara masing-masing saling membutuhkan dan kemudian terbentuklah kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual relationship*). (Kusumaatmadja, 1982:38)

Dinamika hubungan Indonesia dan Australia ternyata telah melewati serangkaian sejarah yang panjang. Pada periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1962 terjadi ketegangan antara hubungan Indonesia dan Australia. Pada saat itu Pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat. Ketika partai komunis Indonesia mulai berpengaruh, Australia mengkhawatirkan bahwa integrasi Nugini Barat akan dijadikan momen bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh komunisme. Masalah tersebut kemudian menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Pada tahun 1962 melalui keputusan PBB yang menyatakan

Irian Jaya menjadi provinsi Indonesia yang ke-26 dan Australia mengakui Irian Jaya (Papua) sebagai bagian integral dari Republik Indonesia. (www.dfat.gov.au)

Seiring dengan berkembangnya waktu pada tahun 1966 memasuki masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia. Sejak awal tahun 1970 Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi warga Australia. Warga Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Kepariwisata telah menjadi suatu cara yang efektif dan penting guna meningkatkan pengetahuan bagi warga Australia tentang bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut sempat meredup ketika terjadinya peristiwa bom Bali I dan menewaskan banyak korban termasuk warga Australia.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto dan naiknya presiden Habibie pada tahun 1999. Pada Tahun 1999, rakyat Timor Timur sebanyak (78.5%) memilih untuk merdeka. Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Oleh karena itu, Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan kekuatan internasional di Timor Timur atau *International Force in East Timor* (INTERFET) dengan tujuan mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Namun kedua negara telah sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan (www.dfat.gov.au). Hubungan yang saling menguntungkan tersebut juga dapat dilihat

dari hubungan perekonomian Indonesia dengan Australia saat krisis 1997 yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut merupakan faktor utama Indonesia mengadakan hubungan dengan negara Australia yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Sejak saat itulah Australia menanamkan investasi di Indonesia dan menjadi mitra bisnisnya. Hal tersebut berpengaruh sangat baik bagi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan tingkat inflasi menurun drastis, nilai tukar terhadap US\$ menjadi stabil, dan devisa Negara meningkat.

Perkembangan hubungan Indonesia-Australia selama ini sangat ditentukan oleh berbagai hal, yaitu: *Pertama*, konstelasi politik internasional, termasuk ada atau tidaknya intervensi dari luar. *Kedua*, faktor kepemimpinan (*leadership*) pada masing-masing negara dan *Ketiga*, berkembangnya isu-isu global, termasuk hak asasi manusia (*human rights issue*) dan demokrasi. Inilah yang kemudian menjadikan hubungan antara Australia dapat berkembang secara dinamis, dimana terkadang hubungan kerjasama dapat berjalan dengan harmonis, namun terkadang juga diwarnai dengan friksi atau ketegangan. (Karenn and Holder, 2006:18)

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat indikasi bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Australia akan terwujud yang terlihat sejak menjelang terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia.

Terdapat beberapa perihal yang menjadi dasar kedekatan antara Indonesia dan Australia yaitu kedekatan Susilo Bambang Yudhoyono yang secara pribadi pernah melakukan kunjungan dan diskusi dengan Pemerintah Australia sebelum Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia.

Selain itu, masih ada beberapa hal lagi yang dianggap menjadi kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono, yang membuat Australia lebih berpikiran positif terhadap Indonesia (www.rsi.sg). Begitu erat dan berartinya hubungan tersebut, maka Perdana Menteri Australia John Howard pernah mengatakan sebagai berikut: *"Australia's bilateral relationship with Indonesia is a strategically important and very close one covering trade and investment, security, intelligence and police cooperation, development cooperation, education and extensive people-to-people ties"*.(ham.go.id)

Pencapaian kerjasama antara Indonesia dan Australia pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ternyata berbeda dengan rezim sebelumnya yaitu kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tidak mampu membangun kerjasama bilateral yang efektif. Secara umum Megawati lebih memfokuskan untuk membangun kerjasama dengan negara-negara Timur, seperti halnya Rusia, Cina, Polandia dan beberapa negara lainnya. Sedangkan untuk kontak hubungan dengan Australia Megawati hanya meneruskan rezim sebelumnya yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan orde baru.(Tyasno, 2010:41)

Kegagalan Megawati dalam membangun kerjasama bilateral yang efektif juga ditandai dengan red data tingkat perkembangan perdagangan yang hanya tumbuh sekitar 1,8% pertahun. Sedangkan pada era Yudhoyono dapat berkembang hingga 7,6% pertahun. Kemudian indikator lainnya adalah adanya kunjungan kenegaraan setingkat kepala negara, baik presiden atau perdana menteri yang hanya dua kali sepanjang pemerintahan Megawati yaitu kunjungan John Howard ke Jakarta,

sedangkan pejabat pemimpin Indonesia tidak melakukan kunjungan ke Australia. Sedangkan pada era Yudhoyono tercatat Sembilan kali. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis memilih judul dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Australia dalam Bidang Ekonomi dan Pertahanan Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

“Mengapa politik luar negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan Australia?”

C. Kerangka Dasar Teori

Dalam menjawab pokok permasalahan tentang motivasi politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan Australia maka digunakanlah beberapa pendekatan yang relevan, yaitu **Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**. Gambaran tentang pendekatan-pendekatan (*approach*) ini akan diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta ataupun individu. Melalui definisi kebijakan ini maka dapat dipahami bahwa kebijakan memiliki peranan penting bagi rezim pemerintahan di suatu negara agar segala tindakan-tindakan dapat berjalan secara efektif dan terarah. (Marbun, 2005:265)

Proses pengambilan kebijakan atau keputusan didefinisikan sebagai satu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Para pengambil keputusan (*decision makers*) melakukan tindakan berupa pengambilan keputusan yang umumnya bukan merupakan keputusan tunggal. Maka, keputusan yang diambil terdiri dari beberapa keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia.

Menurut Spike V. Peterson sebuah kebijakan ekonomi-politik memiliki peranan penting dalam konstelasi ekonomi-politik suatu negara. Mengenai hal ini Peterson menyatakan bahwa :

”...kebijakan ekonomi-politik ditempuh untuk membedakan rencana-rencana individual dengan institusi. Di negara-negara dunia ketiga kerap kali terjadi kegagalan transformasi nilai atas tindakan-tindakan penyelamatan kondisi perekonomian. Untuk itu, kebijakan ekonomi-politik yang penuh perencanaan menjadi solusi agar suksesi dan kebijakan itu sendiri menjadi tidak terputus.” (Peterson, 2003:19)

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian menyusunnya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. Empat issue yang mempengaruhi kebijakan luar negeri (*policy influencers*), yaitu: (1) keamanan nasional; (2) kepentingan ekonomi; (3) ideologis dan historis; (4) sarana dan prosedur politik luar negeri. (Coplin, 1992)

Menurut William D. Coplin, Teori pengambilan keputusan luar negeri, yaitu: “Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu Negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin Negara dalam membuat kebijakan luar negeri dan salah besar jika kita menganggap bahwa para pemimpin Negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri”:

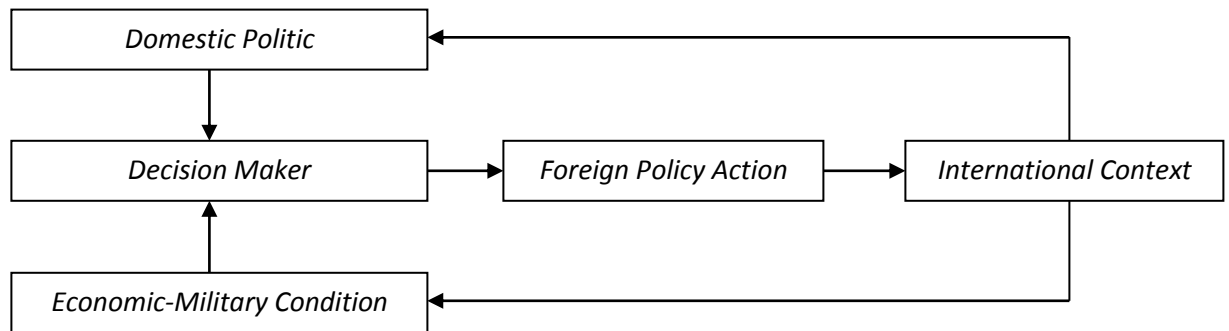
- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri tersebut yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
- b. Situasi ekonomi dan militer di Negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

- c. Konteks Internasional (Situasi di Negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari Negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada proposisi pembuatan kebijakan luar negeri berikut ini:

Gambar 1.1.

Tipologi Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber: William de Coplin, "Introduction to International Politic", dalam Yusuf Sufri, Hubungan Internasional : Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Menurut gambar di atas, politik luar negeri dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional. Akan tetapi pengambilan keputusan luar negeri di mana dalam konteks ini presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional yang dimana dalam model politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.(Martha,2015:19)

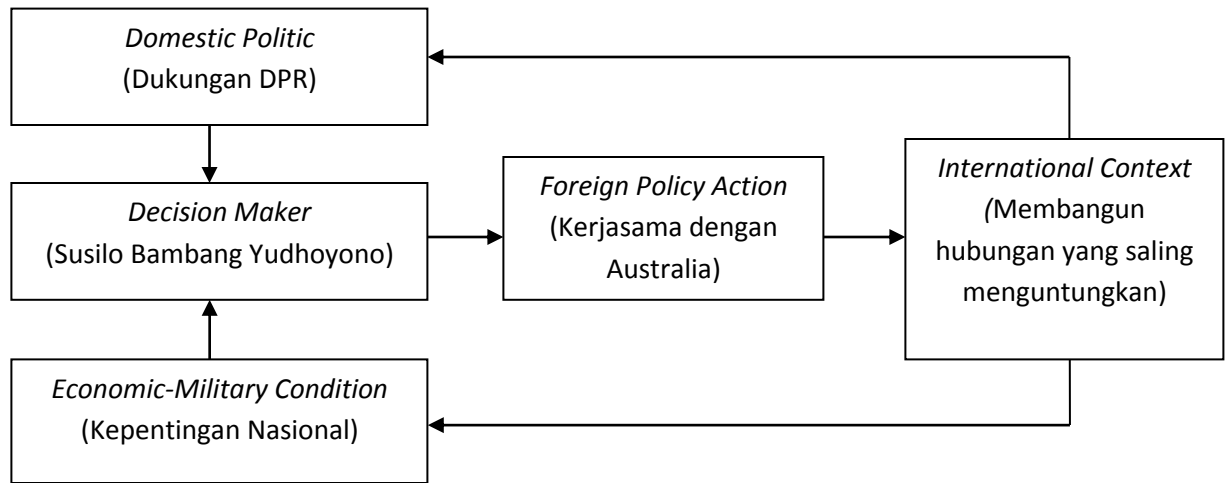
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi ataupun monarkhi konstitusional proses pengambilan kebijakan tidak dapat dijalankan secara

tersentralistik, dimana ini menjadi ciri dasar bagi negara otoritarian. Pembuatan kebijakan dalam negara demokrasi harus memperhatikan kelompok kepentingan dan entitas politik lainnya, termasuk pengelolaan manajemen pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai oposisi.

Pembuatan kebijakan sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin (*top person*) mengelola isu yang berkembang, termasuk dengan membangun inisiatif manipulasi kolektif dan personal. Semuanya mengarah tentang bagaimana seorang pemimpin dapat mempertahankan kekuasaannya dan pengaruhnya, serta mewujudkan berbagai aspirasi dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh para pendiri (*founding father*) dalam memajukan kondisi ekonomi dan politik atas interaksi politik luar negeri dan nantinya dapat dicapai pertimbangan-pertimbangan teknis apakah kerjasama dapat dilanjutkan dalam jangka panjang ataukah hanya sebatas kerjasama-kerjasama jangka pendek.

Dengan demikian berdasarkan pada pendekatan teori pembuatan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William de Coplin maka dapat diaplikasikan dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan Australia yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Implementasi Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri
Dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Atas Australia Pada Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono



Kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional yang melandasi terciptanya hubungan internasional antara Indonesia dengan Australia. Salah satu unsur penting dari politik luar negeri Indonesia ialah pengabdian kepada kepentingan nasional. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional, politik luar negeri Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kebijakan nasional secara keseluruhan. (Inayati&Muna,1998:10)

Pada aspek politik domestik, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi tertentu. Jika dilihat dari situasi politik dalam negeri, politik dalam negeri ini berfokus pada

interaksi antara “*decision maker*” dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Coplin menyebut aktor-aktor politik tersebut dengan “*policy influences*”. Dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal balik antara pembuat kebijakan dengan yang mempengaruhi kebijakan. Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri dengan para pengambil keputusan disebut dengan “*influences system*”. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalin kerjasama dengan Australia diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah dan mendapat hampir 65% dukungan dari DPR. (Martha, Irawan, 2015)

Pada aspek ekonomi dan militer kedua faktor ini merupakan dua sisi variabel yang saling berkaitan, karena sebuah Negara tidak akan bisa membangun ekonomi dengan baik jika tanpa pertahanan militer dan sebaliknya ketika ekonomi suatu Negara baik maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militer Negara tersebut. Terdapat 3 kriteria dalam menentukan kekuatan militer, yaitu: jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, William D., 1992). Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang sangat dibutuhkan oleh suatu Negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu Negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya. (Coplin, William D., 1992)

Susilo Bambang Yudhoyono telah memberi arahan untuk arahan memperluas kerja sama pertahanan yang saling melengkapi dengan negara-negara sahabat, serta

berkomitmen pada upaya perdamaian dan keamanan internasional dalam berkontribusi mewujudkan tatanan dunia yang aman, tentram, dan damai (Susilo Bambang Yudhoyono, Amanat Presiden Republik Indonesia Pada Upacara Hari Ulang Tahun Ke-66, 2011). Arah ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, yang memberi amanah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai negara Indonesia yang memiliki arah politik luar negeri “*bebas aktif*” dan berorientasi pada kepentingan nasional di mana dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditegaskan kembali sebagai “*all directions foreign policy*”, membangun kemitraan dan kerjasama dengan Negara mana saja menjadi sebuah prioritas dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia. Kerjasama dibidang pertahanan merupakan salah satu indikator penting hubungan antara Indonesia dengan Australia. Kerjasama pertahanan antara kedua negara hingga saat ini telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan di antaranya yaitu melalui latihan bersama, pertukaran personel, program pendidikan, *knowledge and experience sharing*, dan juga sejumlah kegiatan lainnya.

Kemudian pada aspek ekonomi, Australia memiliki peranan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan. Jika dikaitkan dengan pendekatan teori pembuatan kebijakan luar negeri maka ini berkaitan dengan kapasitas ekonomi Australia sebagai daya tarik, Australia menjadi negara penting dengan kapasitas perdagangan dengan nilai dari tahun ke tahun yang terus meingkat. Pada tahun 2011-2012 nilai pedagangan kedua negara mencapai 14,9 milyar US Dollar. Kemudian daya tarik Australia lainnya adalah kapasitasnya yang dapat saling melengkapi,

khususnya pada komoditas agribisnis dan perkebunan, peternakan, hingga konstruksi dan eksplorasi energi.(kemendag.go.id)

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-4 Australia di ASEAN dan mitra dagang terbesar ke 13 dari seluruh mitra dagang Australia. Investasi Australia di Indonesia berkembang pesat dan mencapai 3,4 miliar dollar AS pada akhir 2007. Dengan terbentuknya *Free Trade Agreement* (FTA) akan meningkatkan peluang kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara, baik melalui peningkatan proyek kerja sama ekonomi maupun untuk membuka pasar potensial kedua negara. Selain itu untuk meningkatkan hubungan ekonomi, Indonesia dan Australia menyepakati kerjasama *Economic Partnership Agreement* yang tidak hanya di bidang perdagangan barang dan jasa, tetapi juga meliputi *capacity building*.

Pada aspek konteks internasional berkaitan dengan geopolitik suatu Negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Terdapat tiga elemen dasar untuk menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu Negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis (Coplin, William D., 1992). Kerjasama Indonesia dengan Australia tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor, antara lain posisi geografis Indonesia, potensi sumber daya alam, ekonomi, politik, pertahanan, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dunia internasional.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis menarik hipotesis bahwa motivasi atau alasan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan Australia dikarenakan :

- a. Adanya pertimbangan yaitu dukungan dari konstelasi politik dalam negeri Indonesia meliputi faktor kapasitas individu/personal dari Susilo Bambang Yudhoyono, serta dukungan dari para pemangku kepentingan dalam negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional pada bidang ekonomi dan keamanan.
- b. Adanya pertimbangan dari konstelasi internasional dimana keberadaan Australia sebagai negara maju memiliki daya tarik dan potensi perekonomian yang besar yang nantinya dapat mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan Indonesia.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan jangkauan dalam menganalisa masalah di atas yaitu dengan batasan waktu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jangkauan pada periode sepuluh tahun tersebut sedikit diulas selama masih berkaitan dengan tema atau kasus yang sedang dibahas.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan riset, surat kabar, majalah, dan juga melalui internet. Dalam penelitian ini akan dilakukan suatu teknik pengumpulan data dimana data dikumpulkan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian dan kemudian disusun secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta di lapangan yang kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh nantinya akan di analisa dengan menggunakan teori yang diterapkan.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan motivasi/alasan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan Australia meliputi :

- a. Untuk mengetahui adanya alasan dukungan dari konstelasi politik dalam negeri Indonesia meliputi faktor kapasitas individu atau personal dari Susilo Bambang Yudhoyono, serta dukungan dari para pemangku kepentingan dalam

negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional pada bidang ekonomi dan keamanan.

- b. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan dari konstelasi internasional dimana keberadaan Australia sebagai negara maju memiliki daya tarik dan potensi perekonomian yang besar yang nantinya dapat mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi, yaitu:

BAB I yang merupakan bab pendahuluan berisi pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, teori dan konsep-konsep yang melandasi penelitian, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang sejarah hingga hubungan Indonesia dan Australia di masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan hubungan kerjasama diantara kedua negara tersebut.

BAB III merupakan bab yang berisi pembuktian/pembahasan alasan motivasi/alasan politik luar negeri Indonesia era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memprioritaskan kerjasama dengan Australia yaitu adanya pertimbangan yaitu dukungan dari konstelasi politik dalam negeri Indonesia meliputi

faktor kapasitas individu/personal dari Susilo Bambang Yudhoyono, serta dukungan dari para pemangku kepentingan dalam negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional pada bidang ekonomi dan keamanan.

BAB IV merupakan bab yang berisi pembuktian/pembahasan alasan motivasi/alasan politik luar negeri Indonesia era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memprioritaskan kerjasama dengan Australia yaitu adanya pertimbangan dari konstelasi internasional yang menjadikan Australia sebagai negara maju yang memiliki daya tarik dan potensi ekonomi yang besar sehingga nantinya dapat mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan Indonesia.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.